



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Desi Harneti Putri Huspa
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG SUMBER DAYA DAN ORGANISASI
3. NHK : 851899

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.680.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/90 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m²/70 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m²/45 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 231.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU SIRION Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
6. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 66.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 47.945.880



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.024.945.880
III. HUTANG	Rp.	100.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.924.945.880

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.